



2018

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG | 2019

# PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan laporan Kinerja ini mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan ini di susun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, memuat pencapaian kinerja, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018. Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang

Mangupura, 18 Pebruari 2019  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Badung



**AA Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT**

Pembina Tk I

Nip. 19670425 199803 1 006

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Ikhtisar eksekutif</b>	iv
<b>BAB I    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	2
1.4. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II    Perencanaan Kinerja</b>	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	9
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	11
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>15</b>
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja	17
3.3. Realisasi Anggaran	25
<b>BAB IV    Penutup</b>	<b>27</b>
4.1. Simpulan	27
4.2. Rekomendasi/ Saran	27

**Daftar Tabel****Halaman**

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2016 – Th 2021	10
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2018	11
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2018	12
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2018	17
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1	18
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran 2	20
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 3	21
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 4	25
Tabel 3.6	Pagu Anggaran dan Realisasi DPKP 2018	26
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Prioritas	27

**Lampiran**

Lampiran 1.	Indikator Kinerja Utama
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja
Lampiran 3.	Pengukuran Kinerja
Lampiran 4.	Jumlah Program dan Kegiatan serta alokasi pencapaian Sasaran Strategis

# LAMPIRAN

# IKHTISAR EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018 merupakan laporan evaluasi kinerja dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Analisis dilakukan terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan, terdiri dari 6 indikator kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut:

## 1. Sasaran Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan

Dari target untuk 1 indikator adalah 87,39%, realisasi 87,20%, nilai capaian kinerja 99,78% dengan interpretasi **baik**,

Hasil capaian sebagai berikut:

Terpenuhinya penyediaan Rumah layak huni di Kabupaten Badung tidak memenuhi target 100% karena:

- Kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi sehingga pemberian bantuan terhadap 565 KK ditunda. Pada TA 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan survey usulan Bantuan Rumah Layak Huni terhadap 2383 dan 565 memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan hibah Rp. 55.000.000,00.

## 2. Sasaran Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Dari target untuk 1 indikator adalah 100%, realisasi 100%, nilai capaian kinerja 100,00% dengan interpretasi **baik**,

Hasil capaian sebagai berikut:

Terpenuhinya penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Badung yaitu:

- Terlaksananya Bantuan penyediaan Rumah Layak Huni bagi rumah yang terkena bencana, sesuai SPM Urusan Wajib Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana yang terjadi tuntas 100% penanganan, target 100%, realisasi 100% (9 rumah terkena bencana, realisasi bantuan rehab sejumlah 9 rumah).

### 3. Sasaran Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman di dukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai.

Nilai capaian kinerja rata-rata untuk 3 indikator yaitu 111,20% dengan interpretasi **baik**, Hasil capaian sebagai berikut:

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang memadai yaitu:

- Dari target Peningkatan Jalan Lingkungan permukiman yang berkondisi baik TA 2018 sebesar 81,08% di 40 desa dan 15 kelurahan, realisasi sebesar 81,18% sepanjang 95.448,02 m' di Kabupaten Badung sehingga capaian kinerja sebesar 100,12%.
- Dari target Peningkatan drainase lingkungan yang berkondisi baik TA 2018 sebesar 58,74% realisasi sebesar 59,00% sepanjang 25.295,89 m di Kabupaten Badung, sehingga capaian kinerja sebesar 100,45%.
- Dari target Perumahan yang mendapat penanganan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sehingga berfungsi baik TA 2018 sebesar 11,00% (9 Perumahan), realisasi 14,46% (12 Perumahan) sehingga capaian kinerja sebesar 133,33%.

### 4. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Nilai capaian kinerja untuk 1 indikator yaitu 100% dengan interpretasi **baik**,

Hasil capaian sebagai berikut:

Rata-rata hasil ketercapaian akuntabilitas dari 5 program dan 33 kegiatan pendukung adalah 100%.

Realisasi penggunaan dana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan mencapai Rp. 78.671.940.818,87 atau 50,43% dari total pagu sebesar Rp. 156.010.631.518,09.

Pada akhirnya, LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

**S**esuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung atas penggunaan anggaran.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Badung (pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya.



### **1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan melaksanakan urusan bidang pemerintahan yaitu: Urusan Perumahan

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### **b. Fungsi**

Secara singkat, fungsi pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dapat diuraikan sebagai berikut:

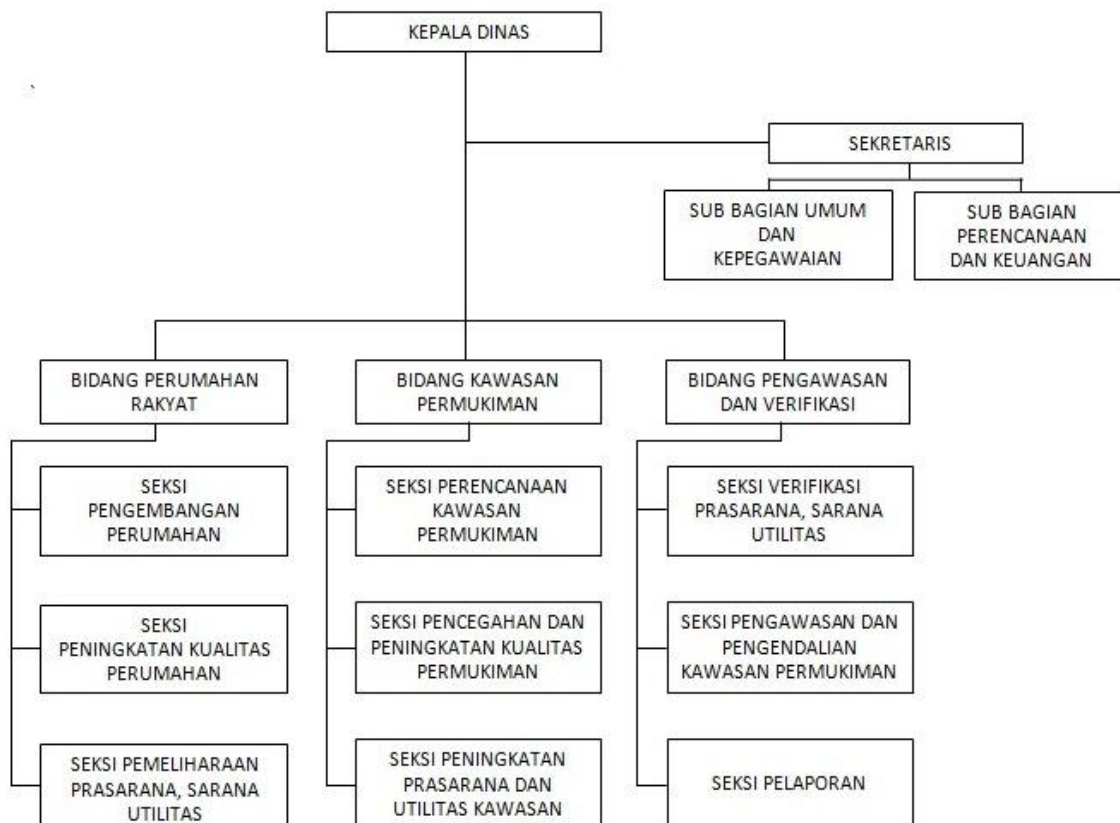
- Memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
- Memvalidasi data teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan
- Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
- Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR

#### **1.3.2 Struktur Organisasi**

Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menurut Peraturan Bupati Badung No. 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah; seperti termuat pada bagan 2.1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa bidang sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan Rakyat
2. Bidang Kawasan Permukiman
3. Bidang Pengawasan dan Verifikasi

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi pada gambar 1.



**Gambar 1.1**

Struktur Organisasi PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

#### 1.4 Sumber Daya Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

##### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 adalah 69 orang. Sesuai dengan struktur organisasinya memiliki pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (3 orang), eselon IV a (11 orang) dan fungsional umum (53 orang).

## **2. Inventaris Kantor**

Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2018 terdiri dari Inventaris Barang untuk menunjang kelancaran administrasi, untuk penunjang operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian sasaran dan tujuan.

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan 2 pokok sub bab yaitu tentang Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Sub bab yang kedua menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun.

#### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

##### A. Tujuan

Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah:

**Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung.**

##### B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Tahun 2016 – 2021 sebanyak 4 sasaran strategis, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan
2. Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
3. Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

#### A. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan.

a. Strategi :

**Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan**

Kebijakan :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/ hunian yang layak
2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah Swadaya
3. Pengendalian titik-titik permukiman kumuh

b. Strategi :

**Menyediakan Rumah dan lingkungan Layak Huni akibat bencana di kabupaten Badung**

Kebijakan :

1. Tanggap darurat terhadap bencana
2. Perbaikan/ pembangunan rumah korban bencana
3. Perbaikan/ pembangunan infrastruktur akibat bencana

c. Strategi :

**Mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak dan Memadai di kabupaten Badung**

Kebijakan :

1. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)
2. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
3. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan di kawasan
4. Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan

d. Strategi :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**

Kebijakan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan tepat waktu
2. Pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang jasa dan verifikasi terhadap PSU Perumahan di Kabupaten Badung sesuai ketentuan
3. Capaian Realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target

## **B. Program Kegiatan**

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2018 adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
- Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Program Penataan Kawasan Perumahan
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman

## **2.2. RENCANA KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 adalah:

**Tabel 2.1**  
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana
3	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik
4	Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik
5	Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik
6	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD

**Tabel 2.2**  
Sasaran, Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator
Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni
Tanggap bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana
Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, sarana, Utilitas (PSU) yang memadai	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik
	Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik
	Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD

**Tabel 2.3**

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Th 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2021
Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung.	Peningkatan kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	74,77	87,39	100	100	100	100
	Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana	100	100	100	100	100	100
	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	77,36	81,08	84,80	88,52	92,24	92,24
		Persentase drainase Lingkungan yang berkondisi baik	58,44	58,74	59,03	59,32	59,62	59,62
		Persentase perumahan dengan Prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang berfungsi baik	-	11,00	23,00	35,00	47,00	47,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100	100	100	100	100	100



**Tabel 2.4**  
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman Th 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018
1	Peningkatan kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	87,39
2	Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana	100
3	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	81,08
		Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	58,74
		Persentase perumahan dengan Prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang berfungsi baik	11,00
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala PD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2018, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Target-target setiap indikator diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
Perjanjian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	87,39 %	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	142.151.000
			Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2. Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah layak Huni di Kabupaten Badung	475.129.900
				3. Survei Kondisi fisik dan kualitas lingkungan padat	17.608.100
Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana	100,00%	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah layak Huni akibat bencana	5.680.600
Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	81,08%	Lingkungan Sehat Perumahan	1. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 2. Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 3. Penyusunan Dok Perencanaan	121.870.994.315,21
	Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	58,74 %	Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	
	Persentase perumahan dengan Prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang	11,00%	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Verifikasi PSU Perumahan 2. Pengawasan Pembangunan Perumahan Pengembang 3. Penyusunan Basis Data	156.660.100 65.733.600 228.691.700

	berfungsi baik			4. Penyusunan DED Pemeliharaan Terpadu Perumahan di Kec. Kuta Utara 5. Penyusunan DED Pemeliharaan Terpadu Perumahan di Kec. Kuta Selatan 6. Penyusunan DED Pemeliharaan Terpadu Perumahan di Kec. Abiansemai 7. Penyusunan DED Pemeliharaan Terpadu Perumahan di Kec. Mengwi 8. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan 9. Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan 10. Pemeliharaan PSU Terpadu di Kec. Mengwi 11. Pemeliharaan PSU Terpadu di Kec. Kuta Utara 12. Pemeliharaan PSU Terpadu di Kec. Kuta Selatan 13. Bantuan Teknis P2P 14. Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Pengilingan 15. Peningkatan Jalan Lingkungan Surya Buwana di Kec. Kuta Utara 16. Peningkatan Jalan Lingkungan Pegending Bali Asri di Kecamatan Kuta Utara 17. Peningkatan jalan Lingkungan Anggungan Asri di Kecamatan Mengwi 18. Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa Kauh di Kecamatan Kuta Utara (lanjutan) 19. Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Abadi Br. Jeroan Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi	131.215.750 92.439.950 74.788.150 92.439.950 50.080.450 75.843.008 3.764.211.300 3.268.218.600 4.277.178.952 164.455.300 60.078.600 287.569.000 153.391.000 307.907.900 1.903.182.255 197.743.900
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00%	- Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	33 jenis kegiatan rutin	3.441.948.346,58

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</li> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)</li> <li>- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Th 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Keterangan	Interpretasi
1.	Capaian < 100%	Baik
2.	Capaian 85 % - 99%	Cukup Baik
3.	Capaian 65 % - 85%	Kurang baik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Pada Tahun 2018 ada 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	87,39	87,20	99,78
2	Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100,00	100,00	100,00
3	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman di dukung PSU yang memadai	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	81,08	81,18	100,12
		Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	58,74	59,00	100,45
		Persentase Perumahan dengan Prasarana, sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik	11,00	14,46	133,33
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00	100,00	100,00

### 3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis :

#### **Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan**

**Tabel 3.2**

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%		74,77	74,77	100,00	87,39	87,20	99,78

Terhadap sasaran **Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan** pada Tahun 2018 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### **Indikator 1:** **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**



Pembangunan Rumah Baru

Dalam Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Th 2016-2021, DPKP adalah PD pendukung dari Misi 4 (Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, sasaran 9 (Menurunnya angka kemiskinan). Tupoksi DPKP adalah melakukan Kegiatan verifikasi dan monitoring usulan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

di Kabupaten Badung, dalam TA 2018 telah melakukan survey terhadap RTS sebanyak 2383 KK. Dari Jumlah yang di verifikasi, sejumlah 565 KK memenuhi kriteria Pembangunan Baru dengan jumlah uang per KK Rp. 55.000.000,00.

Sesuai dengan jumlah hibah Bantuan Tunai yang dianggarkan di BPKAD pada Tahun 2018, diprioritaskan sejumlah 142 KK yang memenuhi kriteria calon penerima bantuan Rumah Layak Huni dan sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 06/0421/HK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018. Jumlah ini merupakan penuntasan hasil verifikasi pada TA 2017.

Target penyediaan Rumah Layak Huni pada TA 2018 adalah 1250 rumah sebagai upaya penuntasan yang ditargetkan Bupati Badung bahwa sampai pada Tahun 2019, ketersediaan Rumah Layak Huni bagi MBR sejumlah 3125 KK adalah 100%. Pada Tahun 2017 telah terealisasi sebesar 625 RLH (100% target tercapai)

Formula pengukuran indikator ini adalah:

$\frac{\text{Jumlah RTLH penerima hibah}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$

Jumlah Rumah

Target pada Tahun 2018 adalah 87.39% (1250 RTLH), realisasi 142 RTLH sebagai calon penerima hibah sehingga capaian kinerja 87.20%.

Tidak tercapainya target akibat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi, sehingga pemberian bantuan terhadap 565 KK ini ditunda.

Sasaran Strategis :

**Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman**

**Tabel 3.3**

**Analisis Pencapaian Sasaran 2**

Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Terhadap sasaran **Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman** pada Tahun 2018 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Indikator kedua merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai pembagian urusan pemerintah berdasarkan UU 23/2014 yaitu: Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana.

## Indikator 2:

### Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Pembagian urusan UU 23/2014 berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman salah satunya meliputi jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kabupaten/ kota dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana.

Dalam Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Th 2016-2021, DPKP adalah PD pendukung dari Misi 7 (Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana), sasaran 15 (Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana).

Tupoksi DPKP dalam mendukung pencapaian sasaran ini adalah melakukan kegiatan fasilitasi pembangunan Rumah Layak Huni akibat bencana.

Formula pengukuran indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Pembangunan Rumah Layak Huni korban bencana}}{\text{Rumah korban bencana}} \times 100\%$$



Kerusakan rumah akibat bencana

Target pada Tahun 2018 adalah 100% yaitu semua korban bencana berhak mendapatkan bantuan penyediaan/ rehabilitasi rumah tinggal layak huni. Ada 9 rumah yang menjadi korban bencana dan sesuai laporan BPBD sampai akhir tahun 2018, semuanya telah mendapat bantuan rehab rumah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Sasaran Strategis :

**Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai**

**Tabel 3.4**

**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	%		77,36	77,44	100,11	81,08	81,18	100,12
2	Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	%		51,18	51,19	100,03	58,74	59,00	100,45
3	Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas yang berfungsi baik.	%		-	-	-	11,00	14,46	131,33

Terhadap sasaran **Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai** pada Tahun 2018 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka penataan PSU Perumahan dan kawasan permukiman, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 19 kewenangan desa meliputi kewenangan local berskala desa.

Yang dimaksud dengan **'kewenangan local berskala desa'** adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa atau prakarsa masyarakat desa, tempat permandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa dan **jalan desa**.

**Indikator 3:****Persentase Jalan Lingkungan permukiman yang berkondisi baik**

Persentase Jalan Lingkungan permukiman yang berkondisi baik diukur dengan perbandingan panjang jalan lingkungan yang ditangani dengan total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Badung x 100 %.

Jalan Lingkungan yang dimaksud adalah jalan-jalan di wilayah permukiman penduduk di luar jalan Kabupaten yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran.

Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis perkerasan dan pemasangan paving dengan lebar jalan bervariasi antara 2,00 – 3,00 M.

Perkembangan pelaksanaan jalan lingkungan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan penanganan jalan lingkungan yang sudah ditargetkan sesuai dengan RPJMD dilaksanakan berdasarkan pola desa/ kelurahan, sehingga secara berkesinambungan setiap tahun semua desa/ kelurahan mendapat perbaikan/ peningkatan jalan lingkungan sesuai dengan target yang ditetapkan.

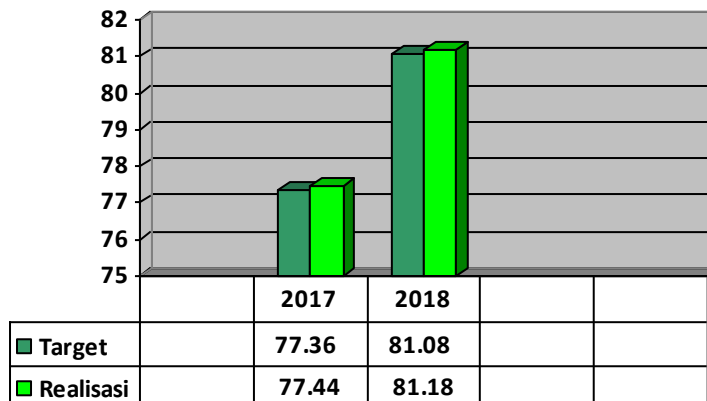
Setelah target RPJMD 2015 terlampaui, pada tahun 2016 dilakukan perbaikan data sesuai hasil survey pendataan panjang jalan lingkungan di kabupaten Badung Th 2015.

Kondisi awal Jalan Lingkungan yang telah ditangani dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 64,67% (1.651.886,92 m') dari target akhir RPJMD Th 2021 sebesar 92,24% (2.356.037,87 m').

Hasil evaluasi pada tahun 2018 dengan target 81,08% ( 2,071,037.87 m') terealisasi sebesar 81,18% ( 2,073,604.16 m') sehingga capaian kinerja sebesar 100,12%. Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 3,74 % di tahun 2018. Sampai akhir tahun 2018 pencapaian melebihi target karena seperti tahun sebelumnya, tetap adanya prioritas penuntasan penanganan jalan lingkungan kondisi kurang baik menuju fasilitas umum seperti pura, menuju lingkungan banjar/ desa di seluruh Kabupaten Badung sesuai hasil kajian teknis sampai Tahun 2018.

Capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1  
Capaian kinerja Tahun 2017 – 2018.



#### Indikator 4:

##### Persentase Drainase Lingkungan permukiman yang berkondisi baik

Persentase drainase Lingkungan permukiman yang berkondisi baik diukur dengan perbandingan panjang drainase lingkungan yang ditangani dengan total panjang drainase lingkungan di Kabupaten Badung x 100 %.

Drainase Lingkungan permukiman yang dimaksud adalah saluran drainase di wilayah permukiman penduduk di luar drainase yang berada di jalan Kabupaten. Perkembangan pelaksanaan drainase lingkungan permukiman merupakan salah satu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

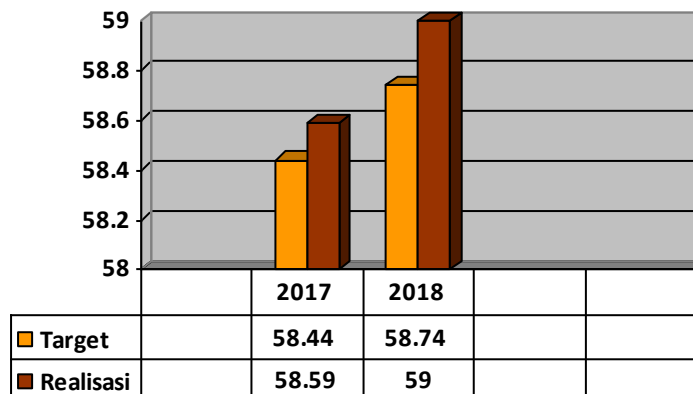
Kondisi awal drainase Lingkungan yang telah ditangani dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 58,21% (2,973,692.00 m') dari target akhir RPJMD Th 2021 sebesar 59,62% (3,045,722.90 m').

Hasil evaluasi capaian sasaran pada tahun 2018 dengan target 58,74% (3,000,767.58 m') terealisasi sebesar 59,00% (3,014,143.99 m') sehingga capaian kinerja sebesar 100,45%. Sampai akhir tahun 2018 pencapaian melebihi target karena seperti tahun sebelumnya, tetap adanya prioritas peningkatan drainase lingkungan untuk menjamin tercapainya penataan prasarana, sarana, utilitas (PSU) lingkungan permukiman berfungsi baik.

Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,50% di tahun 2018.

Capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.2  
Capaian kinerja Tahun 2017 – 2018.



#### Indikator 5:

##### **Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik**

Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berfungsi baik diukur dengan perbandingan Jumlah Perumahan yang mendapat penanganan PSU lingkungan dengan total jumlah perumahan yang sudah Serah Terima di Kabupaten Badung x 100 %.

Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berfungsi baik diukur dengan perbandingan Jumlah Perumahan yang mendapat penanganan PSU lingkungan dengan total jumlah perumahan yang sudah Serah Terima di Kabupaten Badung x 100 %.

Target pada Th 2018 adalah 9 Perumahan (11,00%) yang mendapat penanganan pemeliharaan PSU berupa peningkatan jalan lingkungan perumahan. Berdasarkan prioritas hasil survey lapangan dilanjutkan dengan kajian secara teknis dan melalui mekanisme penganggaran realisasi pada Tahun 2018 adalah 12 Perumahan yang mendapat penanganan, sehingga dari target 11,00% tercapai 14,46% dengan capaian kinerja sebesar 133,33%.

Sasaran Strategis :

**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

**Tabel 3.5**

**Analisis Pencapaian Sasaran 4**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terhadap sasaran **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** pada Tahun 2018 dilaksanakan sebagai kegiatan rutin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja strategis lainnya.

**Indikator 6:**

**Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD**

Program yang dilaksanakan DPKP Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 sesuai DPA sebanyak 9 program, 155 kegiatan. Dari 9 program, 4 merupakan Program strategis pendukung capaian indikator sesuai tupoksi dengan 123 kegiatan, dan 5 program merupakan program rutin untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program dengan 32 kegiatan. Hasil pelaksanaan masing-masing program seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

Program	Jumlah Kegiatan	Pelaksanaan	
		Kegiatan	(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	17	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11	11	100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1	1	100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1	1	100
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Secara fisik, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi serapan anggaran sampai akhir tahun adalah 77,43%. Serapan anggaran tidak tercapai target 100% karena adanya penyesuaian harga sesuai Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Badung dan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja</b>			
1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 14.302.284.567,50	Rp. 11.832.833.359,00	84,33
2. Belanja Langsung	Rp. 141.978.910.228,09	Rp. 66.839.107.459,87	47,08
a. Belanja Pegawai	Rp. 994.891.745,00	Rp. 833.820.937,00	83,81
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 126.681.733.915,59	Rp. 59.561.486.652,87	47,02
c. Belanja Modal	Rp. 14.302.284.567,00	Rp. 6.443.799.870,00	45,05
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp. 156.010.631.518,09</b>	<b>Rp. 78.671.940.818,87</b>	<b>50,43</b>

**Tabel 3.7**  
Realisasi Anggaran berdasarkan program kegiatan prioritas

N O	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN DANA
1	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	634,889,000.00	451,188,300.00	71,07 %
2	Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	5.680.600,00	5.200.700,00	91,55%
3	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman di dukung Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai	137,896,392,281.51	63,715,627,053.87	46,21%
4	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3,441,948,346.58	2,665,089,406.00	77,43%
	<b>TOTAL DANA</b>	<b>141,978,910,228.09</b>	<b>66,837,105,459.87</b>	<b>47,08%</b>

Penyerapan anggaran **belanja daerah** pada tahun 2018 sebesar Rp. 78.671.940.818,87 dari total anggaran Rp.156.010.631.518,09.

Sedangkan serapan anggaran Belanja pada kegiatan strategis Rp. 66.837.105.459,87 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 141.978.910.228,09. Dari total belanja daerah (belanja langsung dan tidak langsung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA 2018, realisasi anggaran total mencapai 50,43% sedangkan pencapaian sasaran strategis sebesar 47,08% .

Rendahnya serapan anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi sehingga terjadi penundaan pembayaran kegiatan.



# BAB IV

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Th 2018, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

- a. Dari sisi pencapaian kinerja, 4 target dari 5 indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi sesuai rencana. Faktor Keuangan daerah menyebabkan 1 target belum dapat dipenuhi, yaitu indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. Secara tupoksi kegiatan telah dilaksanakan tetapi fisik di lokasi/ lapangan belum dapat direalisasikan disebabkan adanya penundaan pencairan dana bantuan hibah Program Bantuan Rumah Layak Huni. Sedangkan 1 indikator kinerja pendukung sasaran strategis adalah kegiatan rutin yang telah dilaksanakan tetapi serapan anggaran tidak mencapai 100% karena efisiensi harga.
- b. Secara umum, adapun faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target adalah:
  - Dukungan komitmen pimpinan dalam penganggaran kegiatan-kegiatan prioritas
  - Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara PD dengan aparat desa/ kelurahan sehingga dapat memberikan pemahaman tentang Standard Operating Procedure (SOP) bantuan hibah kepada calon penerima bantuan hibah/ masyarakat pada bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - Penguatan sistem pengawasan dalam kegiatan fisik sehingga penerapan yang berorientasi pada hasil sesuai rencana dapat terwujud

## 2. Rekomendasi/ Saran

- a. Memperkuat kompetensi SDM dilingkungan kerja dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengawasan kegiatan di lapangan.
- b. Adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat diikuti dengan sistem pendataan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Badung secara elektronik .

Mangupura, 18 Pebruari 2019

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Badung**



**AA Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT**

Pembina Tk I

Nip. 19670425 199803 1 006